

BAB VI

PENUTUP

V1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa penguatan kelembagaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi masih belum efektif.

Hasil dari penelitian menemukan bahwa pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi belum pada tahap pencegahan terbukti arah kebijakan masih dalam tahap pengendalian kabut asap dan pemadaman, dalam konteks pengendalian kebakaran memiliki tiga tahap yaitu tahap pencegahan, tahap pemadaman dan pasca kebakaran. Jika hanya pada tahap pemadaman saja kegiatan dalam pencegahan pengendalian kebakaran yang menjadi landasan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga penguatan kelembagaan dalam pencegahan kebakaran tidak akan sampai pada tujuan. Hal ini yang menyebabkan agenda kegiatan rutin memadam api setiap tahun. Selain itu permasalahan yang belum terselsasikan belum jelasnya tata kelola ruang lahan gambut serta penegakan hukum yang belum tegas tidak patuhnya pemerintah daerah dan pemegang izin usaha dalam memberikan

pengawasan sehingga terkesan pembiaran kepada pemegang izin usaha yang tidak patuh terhadap peraturan standar untuk memenuhi kesanggupan menyediakan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pemegang izin usaha.

Hasil tersebut terlihat dari dimensi sumber daya manusia, dimensi organisasi, dimensi keuangan, dimensi infrastruktur dan *Networking* dari kelima dimensi tersebut akan di paparkan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilihat dari indikator Jumlah personil yang sudah mengikuti pelatihan belum memadai untuk memberi pengawasan dan pemadaman . Kemudian pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi terhadap personil pemadam belum ada kejelasan kegiatan berkelanjutan atau rutin dilakukan, sehingga bencana kebakaran ini akan menjadi komitmen pemerintah daerah.
2. Organisasi, di dalam struktur organisasi yang berkaitan kebakaran hutan dan lahan BPBD dan Dishutbun tidak dicantumkan secara formal dalam urusan kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Muaro Jambi membentuk posko sebagai satgas patroli dan pemadam. pengendali kebakaran hutan dan lahan dikomandani oleh Dan

- Satgas , posko dibentuk oleh BPBD Provinsi Jambi. Adapun tugas dan tanggung jawab posko satgas Kabupaten Muaro Jambi melalui perturan Gubernur belum pada tahap pencegahan, masih dalam tahap penanggulangan asap.
3. Keuangan, Keuangan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik di Dinas Kehutanan dan perkebunan belum memadai, sedangkan keuangan di BPBD Muaro belum ada alokasi dana dikarenakan pemerintah daerah belum menjadi perhatian terhadap bencana kebakaran. sedangkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tidak bisa mengelola anggaran dikarenakan belum menjadi SKPD.
 4. Infrastruktur, sarana dan prasarana perlengkapan yang dibutuhkan di lapangan untuk pemedaman masih kurang memadai. Keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penegndalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk melengkapi sarana dan prasarana namun masih banayak pemegang usaha yang terjadi pemegang izin usah tidak melengkapi sarana dan prasara yang sudah menjadi standar yang telah ditentukan. Selain itu pemerintah provinsi jambi meberikan solusi melaui perda tentang pencegahan dan pengendalain kebakaran hutan dan lahan yakni memberikan alat sebagai penganti membuka lahan dengan cara tidak membakar membarikan bantuan kepada

masyarakat satu Eksvakato satu kecamatan kebijakan ini masih dalam tahap proses persetujuan dan perlu payung hukum untuk melaksanakannya. Sedangkan sarana dan prasarana dalam tindakan prefentif pemerintah berkerja sama dengan swasta dalam membuat kanal blocking untuk kebutuhan air di lahan tanah gambut dan juga untuk persediaan air ketika melakaukan pemadaman.

5. *Network*, kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi sudah dilakukan, baik itu dengan instansi pemerintah kabupaten maupun provinsi, swasta, dan masyarakat dalam hal penggalangan Sumberdaya baik itu SDM, dan parsarana kelengkapan pemadam di lapangan.kecualai dana. Namun hubungan kerjasama dengan lembaga SKPD pemerintah daerah lokal ditemukan pengendalian tindakan freventif terkordinasi bertumpu pada satu lembaga.

V1.2 Saran

Penguatan kelembagaan dalam penecagahan dan pengendalain kebakaran hutan dan lahan di kabuten Muaro Jambi belum pada tahap pemadaman lagi sudah saatnya pemerintah melakukan tindakan pencegahan hal ini yang harus di tekankan adalah:

1. Pengawasan secara ketat oleh pemerintah terhadap izin alih fungsi di lahan gambut dan melakukan peninjawan ulang perizinan di lahan

- gambut perlu di ditindak lanjuti dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Penegakan hukum kepada korporasi bila terdapat melakukan pembakaran secara sengaja maupun pembiaran ketika terjadi kebakaran di lingkungan konsesi.
 3. Pemerintah Kabuapten Muaro Jambi harus mengalokasikan anggaran khusus yang maksimal untuk pencegahan kebakaran.
 4. Peran Pemerintah Dearah serta keterlibatan masyarakat sangat penting. Dalam hal pemberdayakan masyarakat dengan melakukan pendekatan partsifatif dan pembinaan terhadap masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Muaro Jambi seperti kopi, coklat bukan komoditas lain yang dapat menghancurkan lingkungan.

